

INTISARI

Wacana pengusuran lahan untuk pembangunan IKN merupakan isu sosial-ekologis yang sarat kepentingan ideologis dalam media massa. Bahasa media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuk konstruksi makna atas pembangunan serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif ekolinguistik kritis, bahasa dipandang sebagai arena relasi kuasa yang membentuk dan melegitimasi realitas sosial-ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam wacana pengusuran lahan untuk pembangunan IKN pada media *Tempo* periode Agustus 2024–Oktober 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana berupa perhitungan frekuensi kemunculan data. Data berupa teks berita dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan prosedur simak dan catat, kemudian dianalisis melalui identifikasi dan klasifikasi satuan lingual berdasarkan bentuk, referensi, dan fungsi diskursifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eufemisme berfungsi sebagai strategi mitigasi kekerasan, normalisasi dampak sosial-ekologis, pencitraan aktor, dan pengendalian emosi publik, sehingga membingkai pengusuran sebagai prosedur administratif yang rasional. Sebaliknya, disfemisme berfungsi mempertegas konflik ekologis, mendeligitimasi kebijakan, menonjolkan dampak lingkungan, serta menyampaikan kritik moral. Temuan ini menunjukkan adanya tarik-menarik wacana antara legitimasi dan resistensi yang merefleksikan ketimpangan relasi kuasa. Dengan demikian, bahasa media tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai perangkat ideologis yang mempertahankan maupun menantang struktur kekuasaan serta memengaruhi pemahaman publik terhadap pembangunan dan keberlanjutan ekologis.

Kata kunci: eufemisme–disfemisme, wacana pengusuran lahan, Ibu Kota Nusantara (IKN), ekolinguistik kritis, konflik sosial-ekologis

ABSTRACT

The discourse of land eviction for the development of Indonesia's new capital city (IKN) represents a socio-ecological issue embedded with ideological interests in mass media. Media language does not merely reflect reality but also constructs meanings of development and its impacts on society and the environment. From a critical ecolinguistics perspective, language is viewed as a site where power relations operate in shaping and legitimizing socio-ecological realities. This study aims to analyze the use of euphemism and dysphemism in the discourse of land eviction for the development of Indonesia's new capital city (IKN) in Tempo media from August 2024 to October 2025. This research employs a descriptive qualitative method supported by simple quantitative analysis through frequency counts. The data, in the form of news texts, were collected using documentation techniques and analyzed by identifying and classifying linguistic units (words and phrases) based on their forms, references, and discursive functions. The findings reveal that euphemisms function as strategies for mitigating violence, normalizing socio-ecological impacts, constructing positive actor images, and managing public emotions, thereby framing eviction as a rational administrative process. In contrast, dysphemisms emphasize ecological conflict, delegitimize policies, highlight environmental impacts, and express moral criticism. These findings indicate a discursive struggle between legitimization and resistance, reflecting unequal power relations in media discourse. Thus, media language is not neutral but serves as an ideological tool that both maintains and challenges power structures, while shaping public understanding of development and ecological sustainability.

Keywords: euphemism–dysphemism; land eviction discourse; Ibu Kota Nusantara (IKN); critical ecolinguistics; socio-ecological conflict